



PEMERINTAH  
KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2025

# RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan sekaligus menangani berbagai masalah dan tantangannya. Dalam menyikapi keadaan tersebut, maka diperlukan perencanaan yang secara sistematis dan akuntabel agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan dimaksud tertuang dalam Rencana Strategis yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun yang selanjutnya dirinci menjadi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian kami yakin dengan tersusunnya dokumen Rencana Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2025 ini dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Blitar, 08 Agustus 2024  
KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR  
DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN  
EKO SUSANTO, ST., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196907011997031003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3 Sistematika Renja OPD.....	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Opd.....	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	51
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	75
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	78
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan...	83
3.3 Program dan Kegiatan .....	84
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	91
BAB V. PENUTUP.....	103



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk menentukan kebijakan masa depan melalui serangkaian pilihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sektor perikanan dan sub sektor peternakan merupakan bidang usaha yang tersebar merata dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Blitar. Pembangunan di bidang ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah agraris yang menghasilkan ikan budidaya maupun tangkap, serta berbagai komoditas peternakan seperti telur, susu, dan daging. Oleh karena itu, pembangunan sektor perikanan dan sub sektor peternakan perlu menjadi prioritas utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini penting mengingat dominasi sub sektor peternakan dalam pembentukan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar.

Pembangunan sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Blitar perlu disusun dengan perencanaan yang didasari oleh perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah juga harus selaras dengan



kebijakan sistem pemerintahan yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip "Good Governance" di setiap tingkat pemerintahan, guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara

Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan strategis tersebut meliputi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang peternakan dan perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan selalu berupaya memfasilitasi peternak maupun petani ikan dalam meningkatkan usahanya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Peternakan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat



atau target kinerja berupa *output* atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2025.

Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar nantinya lebih diarahkan pada pemantapan produktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas sosial politik sebagai upaya penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar serta sebagai upaya penguatan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha peternakan dan perikanan melalui peningkatan teknologi, pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta pelaku usaha peternakan dan perikanan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - k) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889



#### *Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025*

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- l) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D);
- n) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
- o) Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025 pada OPD ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga tercipta keselarasan dan efektivitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan;
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah, khususnya antara target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), sehingga tercapai keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan;
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun di sektor pertanian (sub sektor peternakan) dan sektor kelautan serta perikanan. Hal ini dilakukan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Blitar.



Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 atau sumber dana lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang diambil selaras dengan mandat dan tanggung jawab dinas;
2. Menyusun program dan kegiatan yang terfokus dan tepat sasaran, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ini penting untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Blitar;
3. Menyediakan bahan masukan dan landasan yang kuat untuk penyusunan kegiatan tahun anggaran 2025. Rencana kerja ini akan menjadi acuan dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan di tahun mendatang, sehingga tercipta kesinambungan dan koherensi dalam pelaksanaan program-program dinas.

#### **1.4. Sistematika Renja OPD**

Penyajian dokumen Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja



provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;



2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;



2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari



penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

##### 1. Faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir, dsb.



2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan;
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
- Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai dan mengukur efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar selama satu tahun anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat mencapai target yang ditetapkan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut.

Tahun 2023 Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar (APBD II) sebesar Rp. 14.458.163.110,00 yang terdapat dalam 11 (sebelas) Program sesuai Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang diakomodir kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2023. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.320.815.055,- atau sebesar 92,13%, dengan rincian pencapaian program dan realisasi anggarannya tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel I**  
Rincian Capaian Program dan Realisasi Anggaran

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		KELUARAN/OUT PUT		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	URAIAN	TARGET	REALISASI
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.802.752.260	9.209.293.553	Rata-rata lingkak capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100	100
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.073.518.000	1.020.095.700	Jumlah produksi perikanan tangkap (tib)	2.300	3.545,30
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	574.904.600	561.171.226	Jumlah produksi perikanan budidaya konsumsi dan hias	16.430,00/20 4.150.250	16.900,08/ 204.778.495



IV	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.999.800	3.964.800	Prosentase peningkatan produksi PUD	5	6,45
V	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	453.435.400	445.168.660	Presentase pengolahan produk Perikanan	10	10,50
VI	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.826.949.500	1.450.881.346	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak (Disnakkan)	0,1	0,8
VII	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.465.500	23.570.000	Prosentase prasarana peternakan layak fungsi	65	65
VIII	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.076.050	377.648.422	Jumlah Produk Ternakan yang Tersertifikasi Presentase Penyakit Hewan Menular yang Tertangani sesuai dengan waktu tanggap	31; 85	34; 89
IX	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	10.000.000	9.549.000	Prosentase Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian (Disnakkan)	96	100
X	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.830.000	2.999.840	Peningkatan Usaha Ternakan yang berizin	4	5
XI	Program Penyuluh Pertanian	243.232.000	216.472.508	Prosentase Peningkatan Ternak Terampil	8	9,6

Tabel 2.

Identifikasi Capaian Program

No	Program	Realisasi Capaian dibandingkan dengan Target			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Tidak Memenuhi	Memenuhi	Melebihi		
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		X		Keterbatasan sumberdaya yang ada dan banyaknya permintaan data serta administratif yang harus dipenuhi.	Memaksimalkan sumberdaya yang ada dan membuat skala prioritas pekerjaan.
2.	Pengelolaan Perikanan Tangkap			X	Minimnya sarana prasarana perikanan tangkap yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat (kapal diatas 5 GT).	Fasilitasi bantuan peralatan perikanan tangkap ke provinsi dan pusat.
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya		X		Tantangan budidaya ikan yang semakin banyak seperti penyakit, produksi ikan yang berkualitas, biaya produksi yang semakin tinggi, pengetahuan	Optimalisasi SDM pembudidaya ikan dan pendampingan penerapan teknologi budidaya ikan pada setiap tahap produksi.



					teknis budidaya ikan yang rendah.	
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		X		Sumberdaya perikanan yang terbatas	Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha perikanan.
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		X		Belum adanya sinkronisasi regulasi yang ada terkait kewenangan Kabupaten dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Memaksimalkan kegiatan sesuai regulasi dan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			X	Wabah penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) menjadikan kurang optimalnya perkembangan biakan ternak.	Melakukan pencegahan dan pengobatan PMK melalui vaksinasi dan pengobatan secara suportif.
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		X		Jumlah prasarana peternakan yang cukup banyak.	Membuat inventarisasi prasarana peternakan sesuai skala prioritas.
8.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		X		Masih adanya PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) di Kabupaten Blitar	Melakukan penanganan dan pencegahan penyakit.
9.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		X		Bencana non alam yaitu munculnya penyakit hewan zoonosis kurang bias diprediksi.	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam mengatasi permasalahan penyakit hewan zoonosis yang muncul.
10.	Perizinan Usaha Pertanian			X	Perubahan regulasi terkait perizinan usaha peternakan di dalamnya menyebutkan bahwa izin usaha pertanian dinilai beresiko rendah sehingga tidak perlu penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis izin usaha pertanian.	Berkoordinasi dengan OPD terkait perizinan usaha.
11.	Penyuluhan Pertanian			X	Jenis penyuluhan yang diminta masyarakat cukup beragam.	Membuat perencanaan dengan skala prioritas sesuai usulan yang masuk.



Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Keterbatasan sumber daya yang tersedia, disertai dengan banyaknya permintaan data serta tuntutan administratif yang harus dipenuhi, merupakan tantangan yang signifikan dalam mencapai target kinerja program/kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya maksimal seluruh tim dalam mengoptimalkan potensi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif sehingga pada tahun 2023 capaian kinerja dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pada tahun 2023, sektor perikanan tangkap laut mengalami lonjakan produksi yang signifikan, mencapai peningkatan sebesar 177,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif, di mana musim kemarau yang berkepanjangan memberikan keuntungan bagi nelayan. Sirkulasi laut yang stabil dan gelombang yang cenderung rendah memfasilitasi peningkatan aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, fenomena El Niño yang terjadi pada tahun tersebut berperan krusial dalam memperkaya populasi ikan di perairan, yang pada gilirannya menciptakan momentum panen raya.

Meskipun demikian, ketergantungan tinggi produksi perikanan tangkap laut terhadap kondisi cuaca menimbulkan risiko yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nelayan. Ketidakpastian iklim dapat mempengaruhi penghasilan mereka dan, secara lebih luas, ekonomi lokal yang bergantung pada hasil perikanan. Untuk mengantisipasi dampak dari variabilitas iklim ini, Dinas Peternakan dan Perikanan berfokus pada strategi diversifikasi usaha bagi nelayan, guna menyediakan alternatif sumber penghidupan dan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dalam menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 didukung oleh kondisi cuaca yang cenderung lebih menguntungkan, dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak positif terhadap produktivitas ikan di kolam. Namun, peningkatan produksi ini tidak diimbangi oleh daya beli masyarakat yang memadai,



sehingga harga jual ikan mengalami penurunan, yang pada gilirannya menurunkan nilai ekonomi produksi.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan langkah-langkah strategis, termasuk optimalisasi pembinaan dan pendampingan untuk menjaga kualitas ikan hias melalui sertifikasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas budidaya ikan konsumsi guna menekan biaya produksi yang terus meningkat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian produksi perikanan budidaya di masa mendatang, meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal.

#### 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Capaian program yang melebihi target tahun ini didorong oleh pengawasan intensif terhadap usaha perikanan tangkap di berbagai perairan seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan nelayan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penangkapan ikan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi ini, diharapkan pelaksanaan penangkapan ikan di lapangan dapat dilakukan sesuai ketentuan, yang mendukung pencapaian target produksi sambil memastikan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

#### 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini diimplementasikan dengan kegiatan pendataan statistik pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Blitar, pembinaan perijinan, FGD pelaku usaha perikanan, gemarikan, gelar produk dan fasilitasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi dan KKP. Target kinerja program ini melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 karena dukungan akses terhadap bahan baku ikan segar berkualitas tinggi dari hasil tangkapan atau budidaya, memastikan kelancaran proses pengolahan dan memenuhi target produksi.



6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Pada tahun 2023, realisasi peningkatan mencapai 0,8%, yang menunjukkan hasil melebihi target. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, di antaranya adalah keberhasilan dalam pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang sebelumnya menjadi hambatan signifikan bagi sektor peternakan. Selain itu, tersedianya sarana pertanian yang memadai dan pembinaan intensif kepada peternak serta kelompok peternak mengenai manajemen pemberian pakan yang efisien, serta pengawasan ketat terhadap kualitas pakan ternak yang beredar di Kabupaten Blitar, turut memperkuat hasil yang dicapai.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar juga mengimplementasikan berbagai inisiatif peningkatan pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan. Inisiatif ini berhasil meningkatkan angka service per conception, yang berujung pada peningkatan tingkat kebuntingan dan kelahiran ternak. Di sisi lain, peningkatan kapasitas petugas inseminasi buatan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan menjadi langkah kunci untuk memastikan kualitas layanan yang lebih optimal.

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Kegiatan pada program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mencakup fasilitasi pemeliharaan serta operasional pasar hewan terpadu dan rumah pemotongan hewan. Namun, saat ini kondisi prasarana yang tersedia belum memadai dan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target program yang telah direncanakan. Untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kualitas penyediaan prasarana pertanian, pada tahun 2024 direncanakan pelaksanaan rehabilitasi bangunan Rumah Pemotongan Hewan-Ruminansia serta Rumah Pemotongan Hewan-Unggas. Melalui upaya rehabilitasi ini, diharapkan prasarana peternakan yang disediakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Capaian kinerja pada program ini melebihi target di tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan status kesehatan ternak dengan pelayanan kesehatan hewan terpadu, respon cepat aduan kejadian penyakit



hewan, optimalisasi pelayanan pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer maupun peternak, serta optimalisasi pelayanan laboratorium kesehatan hewan bisa terlaksana dengan baik didukung oleh kerja tim dengan reaksi yang cepat sehingga capaian yang diperoleh bisa melebihi dari yang ditargetkan.

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Capaian kinerja pada program ini memenuhi target dengan dukungan kegiatan pengendalian dan Penanggulangan bencana peternakan berupa investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies), dan pengendalian Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza

10. Program Perizinan Usaha Pertanian;

Upaya peningkatan pengembangan usaha peternakan salah satunya didukung oleh adanya peningkatan jumlah pengajuan perijinan. Tuntutan profesi menyebabkan target indikator kinerja prosentase peningkatan jumlah pengajuan perijinan dokter hewan.

11. Program Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan dalam program penyuluhan pertanian mencakup monitoring dan pembinaan kepada masyarakat peternak serta kelompok-kelompok peternak, khususnya dalam menerapkan sistem beternak yang baik dan ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan juga pembinaan dan pelatihan terkait pengolahan produk asal hewan. Tingginya minat masyarakat untuk meningkatkan keterampilan beternak melalui pelatihan berperan signifikan dalam pencapaian kinerja program ini. Antusiasme masyarakat yang tinggi mendorong capaian indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, menunjukkan keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas peternak di daerah.



Tabel 3.  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PERENCANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d  
TAHUN 2023  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi I (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>												
3	25	1										
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	80,5	100	100	100,00 %	100	280,5	289%
3	25	1	2	1								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	%	100	100	100	100,00 %	100	300	300%
3	25	1	2	1	1							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dokumen	3	3	3	100,00%	2	8	57%
3	25	1	2	1	7							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	3	3	3	100,00 %	5	15	150%
3	25	1	2	2								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	100	%	100	100	100	100,00 %	100	300	300%



3	25	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276	orang/bulan	77	76	75	98,68%	76	220	85%
3	25	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	380	Dokumen	300	300	363	121,00%	20	683	180%
3	25	1	2	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	Dokumen	4	4	4	100,00%	3	11	69%
3	25	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	Dokumen	0	5	5	100,00%	0	5	25%
3	25	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Laporan	8	14	14	100,00%	18	32	178%
3	25	1	2	5		Identifikasi Kepagawatan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi (Kepagawatan Perangkat Daerah)	95	%	0	0	0	#DIV/0!	95	95	100%
3	25	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62	Orang	0	0	0	#DIV/0!	100	100	161%
3	25	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara elektronik	95	%	100	95	95	100,00 %	95	290	305%



3	25	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62	Paket	10	1	1	100,00%	13	24	39%
3	25	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Paket	38	4	4	100,00%	10	52	104%
3	25	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	2	0	0	#DIV/0!	0	2	10%
3	25	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	65000	Paket	6	6	6	100,00%	3	15	0%
3	25	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2000	Laporan	12	151	151	100,00%	475	638	32%
3	25	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	95	%	60	95	95	100,00 %	95	250	263%
3	25	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	3	0	0	#DIV/0!	5	8	32%
3	25	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	22	1	1	100,00%	4	27	135%
3	25	1	2	8		Penyelesaian Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan tepat waktu	90	%	95	100	100	100,00 %	90	275	306%
3	25	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	12	12	12	100,00%	12	36	60%
3	25	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100,00%	12	36	60%
3	25	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100,00%	0	24	35%



3	25	1	2	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diwujudkan	126	Laporan	12	12	12	100,00%	12	36	29%
3	25	1	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Ususan Pemertaha Daerah	Prosentase Derang Milik Daerah Pemangjang Ususan Pemertaha Daerah dalam kondisi baik	90	%	92	90	90	102,22 %	90	272	302%
3	25	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	Unit	15	15	15	100,00%	12	42	67%
3	25	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	0	0	0	#DIV/0!	4	4	50%
3	25	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	Unit	10	10	10	100,00%	8	28	70%
3	25	1				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2935	Ton	1464,3	2300	3545,3	154,14 %	3.557	8556,6	292%
3	25	1	2	1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Genangan Air Lainnya yang Dapat Disalurkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah nelayan PDD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	145	Nelayan/kelompok nelayan	30	10	11	110,00 %	30	71	49%
3	25	3	2	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	5	Dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	60%
3	25	3	2	1	4	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125	Unit	0	0	0	#DIV/0!	25	25	20%



3	25	3	2	1	3	Pengjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125	Unit	1	1	1	100,00%	0	2	2%
3	25	3	2	2		Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan	1366	Nelayan	301	510	328	99,62%	280	1110	81%
3	25	3	2	2	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan pautannya	705	Orang	179	328	326	99,39%	160	665	85%
3	25	3	2	2	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelmahagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelmahagaanya	406	Kelompok	108	20	20	100,00%	80	200	51%
3	25	3	2	2	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Pasyakurw Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	175	Unit usaha	15	2	15	750,00%	40	70	40%
3	25	3	2	1		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	2113	Ton	1873	1250	2719,56	94,41%	2870	6662,56	315%
3	25	3	2	3	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	1	1	1	100,00%	1	3	300%
3	25	3	2	4		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Bawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	35	Unit Kapal	55	43	43	100,00 %	34	131	374%



3	25	3	2	4	2	Pelayanan Perorbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	35	Rekomendasi	55	40	42	105,00%	34	131	374%
3	25	4				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN HUDDAYA	Jumlah Produk Perikanan Konsumsi	19700	Ton	16426,3	16430	16900,08	102,06 %	17.000	51.126,38	259%
							Jumlah Produk Perikanan Non Konsumsi / Hias	23.147.725 1	Ekor	20394631 0	20415025 0	20477849 5	100,31 %	204.880,08 4	61360560 9	259%
3	25	4	2	2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	409	Pembudidaya	124	100	140	140,00 %	140	404	103%
3	25	4	2	2	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	367	Kelompok	7	5	5	100,00%	6	18	5%
3	25	4	2	2	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelompok	15	Kelompok	5	3	3	100,00%	4	12	80%
3	25	4	2	2	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	27	Kelompok	2	2	2	100,00%	2	6	22%
3	25	4	2	4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	6	Jenis Pengelolaan	0	5	5	100,00 %	6	14	233%
3	25	4	2	4	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	3	1	1	100,00%	1	5	100%
3	25	4	2	4	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	3	1	1	100,00%	2	6	120%



3	25	4	2	4	9	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11	Unit	3	1	1	100,00%	2	6	55%
3	25	4	2	4	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengolahan Kesehatan Ikan	800	Dokumen	150	60	62	103,33%	75	287	36%
3	25	4	2	4	10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1667	Unit	20	30	30	100,00%	30	80	5%
3	25	3				<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Prosentase Peningkatan produksi POD	5	%	6	5	6,45	129,09 %	5	17,45	349%
3	25	3	2	1		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disambatkan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	30	Orang/kelompok	15	15	16	100,09 %	27	58	193%
						Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disambatkan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disambatkan dalam Kabupaten/Kota	15	Dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	20%



							Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15	Dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	20%
3	25	5	2	1	4		Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang dipertika keputuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	15	Pelaku usaha		0	0	#DIV/0!	12	12	80%
3	25	5	2	1	7		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	15	Pelaku usaha		0	0	#DIV/0!	15	15	100%
3	25	3					<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Prosesatase Pengolahan produk perikanan	26	%	7,29	10	10,5	105,00 %	15	32,89	127%
3	25	3	2	1			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	5	Dokumen tanda daftar	1	1	1	100,00 %	1	3	60%
3	25	6	2	1	1		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	Dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	60%
3	25	5	3	2			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang terlibat dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	120	Pelaku usaha	16	30	25	83,33%	26	67	56%



3	25	6	2	2	1	Pelaksanaan Rimbangan dan Penerapan Peraturan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Peraturan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	120	Unit usaha	16	30	25	83,33%	26	67	56%
3	25	6	2	2	1	Pembinaan terhadap Penerapan Peraturan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Peraturan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	120	Unit usaha	0	0	0	#DIV/0!	26	26	22%
3	25	5	2	3		Penyelesaian dan Pengaliran Bahan Baku Industri Pengaliran ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengaliran ikan yang disediakan	81,546	Ton	25	25	30	112,00 %	27,016	80,016	98%
3	25	6	2	3	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	20	Ton	25	2	3	150,00%	27	55	196%
3	25	5	2	3	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4	Pelaku usaha	0	2	2	1	2	4	100%



3	27	1				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAH	Presentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	0,3	%	-0,49	0,1	0,8	800,00 %	0,3	1,2	-23%
1	27	1	2	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Erwanangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengendalian SDG	2	jenis Fasilitas	2	2	2	100,00 %	2	6	300%
3	27	1	2	2	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	16	Dokumen	12	10	10	100,00%	1	21	88%
3	27	2	2	2	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	13	Dokumen	1	1	1	100,00%	3	5	38%
3	27	1	2	3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Bibit/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	15150	satapel bibit/pakan	1964	1299	1910	189,17 %	1500	4610	118%
3	27	1	2	3	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	15150	Laporan	1037	725	812	112,00%	1100	2637	20%
3	27	1	2	4		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Penggerak	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang diawasi	332	Unit usaha	30	30	31	103,33 %	30	91	47%
3	27	2	2	4	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Kesamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Kesamanan Obat Hewan yang Beredar	12	Laporan	12	25	21	84,00%	12	58	192%
3	27	1	2	5		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	93	Unit usaha pakan ternak	11	8	8	100,00 %	20	36	104%
3	27	1	2	5	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	300	Laporan	50	4	4	100,00%	50	58	53%



3	27	1					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Presentase Prasarana Pertanian Layak Fungsi	78	%	65	65	65	100,00 %	80	210	262%
3	27	1	2	2			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/ dipelihara	6	Unit	11	5	5	100,00 %	5	15	317%
3	27	2	2	5	1		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	2	Unit	1	0	0	#DIV/0!	0	0	50%
3	27	3	2	5	3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5	Unit	2	0	0	#DIV/0!	1	1	60%
3	27	3	2	5	7		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5	Unit	3	3	3	100,00%	0	6	120%
3	27	3	2	5	8	1	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroperasi	3	Unit	0	0	0	#DIV/0!	3	3	100%
3	27	3	2	5	9		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4	Unit	5	2	2	100,00%	2	6	275%
3	27	4					<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi	34	Sertifikat	31	31	34	109,68 %	35	100	303%
								Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	88	%	88	85	89	104,71 %	65	239	297%



3	27	4	2	1	1	Penjagaan Kesihatan Hewan, Pemasukan dan Pembekuan Daerah Waboh Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesihatan Hewan yang Dijamin	85	%	98,5	100	100	100,00 %	65	258	252%
3	27	4	2	1	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	550	Laporan	214	50	31	102,00%	0	101	39%
3	27	4	2	1	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Waboh Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Waboh yang Terkendali dilakukan surveilans dan	300	Laporan	0	0	0	#DIV/0!	100	100	33%
3	27	4	2	1	5	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	75	Wilayah	0	0	0	#DIV/0!	20	20	33%
3	27	4	2	1	6	Pelaksanaan Penyelidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	30	Kasus	0	0	0	#DIV/0!	30	30	33%
3	27	4	2	2	2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang diterbitkan	2300	Dokumen	413	200	258	134,00 %	200	668	80%
3	27	4	2	2	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2300	Laporan	463	200	268	134,00%	0	468	33%
3	27	4	2	2	4	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	950	Laporan	0	0	0	#DIV/0!	550	550	26%



3	27	4	2	3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikalifa	19050	Pelayanan	12636	440	510	115,91 %	650	1600	107%
3	27	4	2	3	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	17200	Laporan	3981	200	220	110,00%	150	570	43%
3	27	4	2	3	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2650	Laporan	8645	240	290	120,83%	500	1030	372%
3	27	4	2	4		Penerapan dan Pengawasan Perysatan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterangkan dan diawasi perysatan teknis kesehatan masyarakat	390	Unit usaha	546	180	171	95,00%	5	356	194%
3	27	4	2	4	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	90	Laporan	45	32	38	110,75%	0	70	50%
3	27	4	2	4	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	250	Laporan	340	136	121	88,97%	250	507	234%
3	27	4	2	4	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	250	Dokumen	161	12	12	100,00%	10	74	86%
3	27	4	2	4	5	Pembinaan Penerapan perysatan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan perysatan hygiene sanitasi	50	Unit Usaha	0	0	0	#DIV/0!	80	80	40%
3	27	4	2	5		Penerapan dan Pengawasan Perysatan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Perysatan Teknis Kesejahteraan	20000	Lokasi	3038	3000	3094	103,13 %	2500	9594	49%
3	27	4	2	5	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	63400	Unit	15647	251	251	100,00%	0	502	42%
3	27	4	2	5	3	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1750	Unit	0	0	0	#DIV/0!	251	251	29%



3	27	1				<b>PROGRAM PENGEKSPANSI DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	100	%	96,3	96	100	104,17 %	100	296	197%
3	27	1	2	1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan ditentaskan	3	Bencana	3	3	3	100,00 %	3	9	200%
3	27	5	2	1	4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3	Laporan	12	4	8	200,00%	3	15	500%
3	27	6				<b>PROGRAM PEHIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Peningkatan Usaha Peternakan yang Bertahap	10	%	0	4	5	125,00 %	5	14	28%
3	27	6	2	2		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/BBH Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Produksi Benih/BBHTernak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha Produksi Benih/BBHTernak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	23	Izin usaha	0	13	0	0,00%	2	17	65%
3	27	6	2	2	4	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	39	Laporan	13	12	25	206,33%	0	37	67%
3	27	6	2	2	6	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Pushewan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Pushewan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	50	Laporan	0	0	0	#DIV/0!	2	2	30%



3	27	7				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan peternak terampil	#	%	8,11	#	9,6	120,00 %	#	25,6	301%
3	27	7	2	1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh keahlian Penyuluhan Peternak yang dilaksanakan	420	Orang	145	280	250	125,00 %	100	550	112%
3	27	7	2	1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Unit	25	10	12	120,00%	20	42	132%



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan RPJMD, sasaran RPJMD dan indikator sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, target capaian serta capaian kerjanya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IK K	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	<b>Indikator Sasaran</b>											
	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah (Nilai)			A	A	A	A	A	A	B+	B+	
	Prosentase peningkatan produksi perikanan (%)			0,3	0,4	0,1	0,1	(22,48)	72,71	0,1	0,1	
	Prosentase peningkatan produktifitas ternak (%)			0,5	0,5	0,5	0,5	0,16	0,21	0,2	0,3	
	Prosentase produk peternakan yang layak edar (%)			98,1	98,1	98,2	98,2	95,05	97	98,2	98,2	
	Prosentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)			80	80	80	80	NA	91	91	92	
II	<b>Indikator Program</b>											
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											
	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)			100	100	100	100	88,5	100	100	100	



2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	√	2.536	2.663	2.796	2.300	1.454,30	3.545,30	3.553	3.557			Produk si perikan an sangat dipenga ruhi oleh cuaca
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya												
	Jumlah produksi perikanan konsumsi (Ton)	√	17.978	18.158	18.339	18.523	16.426,26	16.900,08	17.300	17.800			
	Jumlah produksi perikanan non konsumsi/hias (ekor)	√	227.250.000	229.522.500	231.817.250	234.135.902	203.946.310	204.778.495	204.780.000	204.880.884			
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan												
	Prosentase peningkatan produksi PUD (%)		3	5	5	5	6,3	6,45	5	5			
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan												
	Prosentase pengolahan produk perikanan (%)		10	20	22	24	7,3	10,5	12	15			
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian												
	Prosentase peningkatanpe nyediaan bibit ternak (%)		0,3	0,3	0,3	0,3	(-0,49)	0,8	0,3	0,3			
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian												
	Prosentase prasarana peternakan layak fungsi (%)		72	72	72	75	65	65	75	80			
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner												



	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi (Sertifikat)			26	28	30	32	31	34	34	35	
	Prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai waktu tanggap (%)			81	83	85	87	86	89	90	92%	
9	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>											
	Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan (%)			100	100	100	100	96,9	100	100	100	
10	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>											
	Prosentase peningkatan jumlah pengajuan perijinan (%)			20	20	20	20	4	5	5	5	
11	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>											
	Prosentase peningkatan peternak terampil (%)			8	8	8	8	8,11	9,6	8	8	

Berdasarkan tabel Analisa pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Analisa capaian indikator yang tidak sesuai dengan target diuraikan sebagai berikut:

1. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan

Indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 ditargetkan terjadi penurunan sebesar 0,1 % jika dibandingkan dengan tahun 2021, akan tetapi dalam realisasinya justru terjadi penurunan lebih dari yang ditargetkan yaitu sebesar 22,48 %. Penurunan yang prosentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 yang cukup banyak jika dibandingkan tahun 2021 karena secara umum perbandingan produksi perikanan tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi. Turunnya produksi perikanan tahun 2022 ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

- a. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan: Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan (-22,48%) akibat cuaca atau faktor eksternal



lainnya. Namun, pada 2023, terdapat peningkatan yang cukup drastis sebesar 72,71%, menunjukkan pemulihan dari penurunan sebelumnya. Peningkatan produksi perikanan yang cukup signifikan ini disebabkan adanya peningkatan dari perikanan tangkap. Musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya cenderung menciptakan kondisi laut yang lebih stabil, terutama dari segi ombak dan arus laut. Cuaca yang cerah dan gelombang yang tenang membuat aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih mudah dan aman, sehingga nelayan dapat melaut lebih sering dan menangkap lebih banyak ikan.

- b. Prosentase Peningkatan Produktivitas Ternak: Kinerja tahun 2022 cukup rendah (0,16%) namun mengalami perbaikan di tahun 2023 menjadi 0,21%. Peningkatan yang stabil diproyeksikan untuk tahun berikutnya dengan berbagai upaya seperti pembinaan dan pengendalian penyakit.
- c. Prosentase Produk Peternakan Layak Edar: Realisasi pada tahun 2022, sebesar 95,05% yang menunjukkan masih di bawah target, namun meningkat di tahun 2023 menjadi 97%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pengawasan produk peternakan menunjukkan hasil yang positif, dan target di tahun mendatang adalah mencapai 98,2%.

### 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

Berikut isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kabupaten Blitar;
2. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya;
3. Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat serta bahan pangan asal hewan yang ASUH;
4. Bahan pakan ternak masih import sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi;



5. Fluktuasi harga produk peternakan (telur, daging);
6. Keterbatasan bahan baku pakan ternak (jagung) dan ketergantungan impor (bungkil kedelai)
7. Tingkat persaingan pemasaran produk perikanan di pasar global makin tinggi terutama terkait mutu dan keamanan pangan;
8. Fluktuasi cuaca yang mempengaruhi produksi perikanan;
9. Rendahnya permintaan pasar akan ikan hias terutama ikan koi;

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:

Analisis SWOT Isu-Isu Strategis	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
	Potensi sumberdaya yang mendukung peternakan dan perikanan.	Kondisi alam yang tidak menentu, seperti cuaca ekstrem, seringkali menghambat produktivitas sektor perikanan dan peternakan.
	Regulasi yang mendukung budidaya dan akses permodalan. Adanya kebijakan yang mengatur pengembangan kawasan budidaya serta akses modal memfasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan bisnisnya.	Kurangnya fasilitas pendukung dalam kinerja kelembagaan membatasi efektivitas pelaksanaan program
	Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten meningkatkan kesinambungan pelaksanaan program program	Minimnya sinergi antar bidang di dalam dinas menghambat kelancaran pelaksanaan program-program strategis.
	Kondisi lingkungan yang belum tercemar memungkinkan kegiatan perikanan yang lebih sehat dan berkelanjutan Kebutuhan pasar terhadap produk	Pengembangan perikanan belum optimal dan terpadu Masih adanya Penyakit Hewan Menular



		peternakan di Kabupaten Blitar memberikan peluang besar bagi pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha	Strategis (PHMS)
		Meningkatnya penanganan kasus Penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS)	Fluktuasi harga produk peternakan dan sarana prasarana peternakan seperti harga pakan
		Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam mengonsumsi ikan mendorong permintaan dan produksi.	Pasokan bibit dan pakan ternak yang berkualitas belum memadai untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat
		Dukungan lingkungan kerja yang kondusif	Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program secara efektif.
		Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran
		Kerjasama antar pegawai mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas
Opportunity (O)	Adanya perkembangan teknologi budidaya dan penangkapan ikan	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur</li> <li>2. Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja</li> </ol>
	Adanya program kegiatan kelautan dan perikanan pusat		
	Tingginya potensi pasar nasional dan internasional		
	Jumlah pembudidaya dan nelayan yang cukup besar		



	Kekompakan SKPD terkait dalam pemenuhan bahan pakan ternak	Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak	Intensifikasi penanggulangan penyakit ternak
Threat (T)	Pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dalam penangkapan ikan	Mengoptimalkan intensifikasi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya
	Kualitas sarana dan prasarana budidaya dan tangkap yang kurang memadai	Melindungi, mengelola dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan kegiatan perikanan.	
	Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha perikanan	Mendukung diversifikasi produk hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan peluang pasar baru	
	Penurunan kualitas lingkungan kelautan dan perikanan		
	Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat dan produknya yang ASUH		Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal
	Adanya investor asing yang masuk ke Indonesia (MEA)		

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan sebelas (11) Strategi (St.) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar antara lain:

1. Penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap;
3. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya;
4. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;



6. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
7. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
8. Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
10. Fasilitasi perizinan usaha pertanian/ peternakan;
11. Penyuluhan/ pendampingan usaha pertanian.

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah;
4. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota;
10. Optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
11. Penyelenggaraan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
12. Peningkatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
13. Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
14. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungau, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota;



15. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
16. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
17. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
18. Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/ Kota;
19. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ Kota;
20. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
21. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
22. Penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota lain;
23. Optimalisasi pembangunan prasarana pertanian;
24. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
25. Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota;
26. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota;
27. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota;
28. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
29. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
30. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota;
31. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah Kabupaten/ Kota;
32. Pelaksanaan penyuluhan pertanian serta pendampingan usahanya.

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis *Balanced Score Card* (BSC) yaitu menggunakan



analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk tahun depan adalah sebagai berikut:

<b>Strategi 1: Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur</b>			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	-	-
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	Menjamin terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-
4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-

<b>Strategi 2: Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja</b>			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	-	-
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-
4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-



<b>Strategi 3: Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak</b>			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Prespektif 1 : <b>Masyarakat</b>	Mendorong optimalisasi ketersediaan produk hasil peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Prespektif 2: <b>Proses internal</b>	-	-
3	Prespektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-
4	Prespektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-

<b>Strategi 4: Intensifikasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Prespektif 1 : <b>Masyarakat</b>	Menjamin kondisi ternak bebas penyakit	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2	Prespektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Prespektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-
4	Prespektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-

<b>Strategi 5: Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal</b>			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Prespektif 1 : <b>Masyarakat</b>	Menjamin kualitas produk pangan asal hewan layak konsumsi dan produk non pangan asal hewan layak pakai	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2	Prespektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3 4	Prespektif 3: <b>Kelembagaan</b>	Menjamin adanya peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan dan SDM peternak	Program Penyuluhan Pertanian



4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>	Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk beternak	
---	----------------------------------	---	--

<b>Strategi 6: Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan usahadana kelembagaan perikanan budidaya</b>			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>		
4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-

<b>Strategi 8: Meningkatkan kualitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</b>			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	Mendukung diversifikasi produk hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan peluang pasar baru	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-



**Strategi 7:  
Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap**

No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	Mengoptimalkan intensifikasi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-

**Strategi 9:  
Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	Melindungi, mengelola dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan kegiatan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2025 juga memperlihatkan pengarusutamaan dari :

a. Stunting

Meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

b. Pengarusutamaan Gender

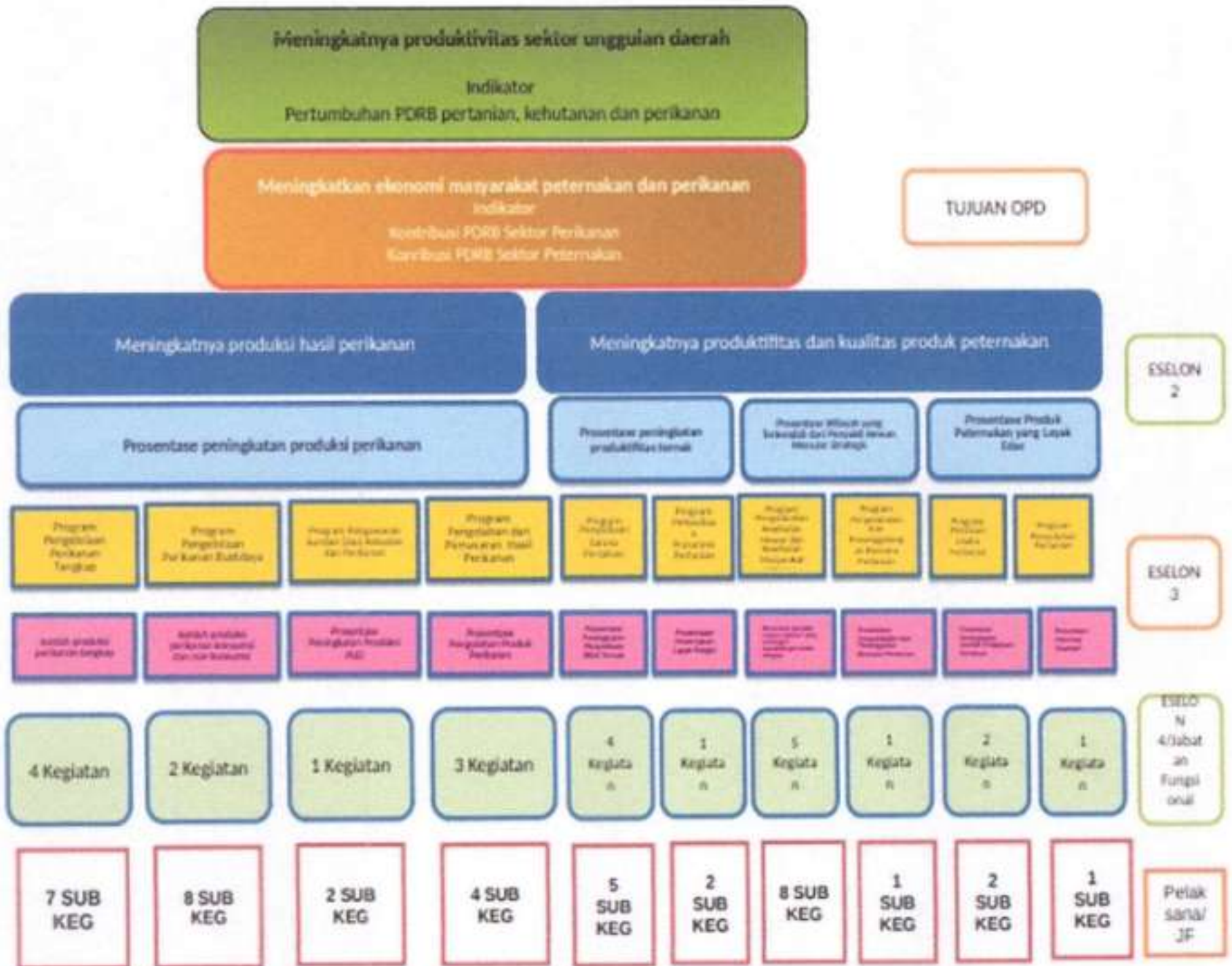
Meningkatkan akses, partisipasi control dan manfaat gender di bidang Peternakan dan Perikanan

c. Penanggulangan Kemiskinan

Penyelarasan sasaran kegiatan dalam pengentasan kemiskinan di bidang peternakan dan perikanan



Penjabaran program dan kegiatan terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada pohon kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai berikut:





Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka melaksanakan visi tersebut diatas Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:

1. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
5. Optimalnya pengelolaan ruang laut.



Peternakan merupakan sub sektor pertanian sehingga menjadi bagian dari pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu:

- a. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:
  - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
  - 2) Pengembangan pakan ternak;
  - 3) Kesehatan hewan;
  - 4) Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan.
  - 5) Dukungan manajemen kesekretariatan.



- b. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
  - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
  - 2) Pengembangan pakan ternak;
  - 3) Kesehatan hewan;
  - 4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
  - 5) Penjaminan pangan asal hewan;
  - 6) Dukungan manajemen kesekretariatan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema Rancangan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah “Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Daerah”. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang; Ketahanan Bencana; dan
4. Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik; dan
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup;

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok fungsi untuk tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan ketiga yaitu Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang; Ketahanan Bencana dan Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan, mulai dari perencanaan awal hingga tahap penyusunan akhir yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada tahap rancangan awal RKPD, umumnya disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, usulan dari perangkat daerah, serta arahan kebijakan nasional dan daerah. Namun, hasil akhir RKPD



sering kali mengalami perubahan, terutama terkait dengan pagu anggaran yang disesuaikan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan pada pagu anggaran dalam RKPD akhir. Perubahan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor Program atau kegiatan yang pada awalnya direncanakan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar mungkin mengalami penurunan alokasi anggaran karena perubahan prioritas pemerintah daerah. Sebaliknya, program baru atau program yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan mungkin memperoleh tambahan anggaran.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan hasil akhir yang mengalami perubahan pagu anggaran menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di tingkat daerah bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan berbagai variabel, termasuk analisis kebutuhan, evaluasi kinerja, serta kebijakan pemerintah pusat. Perubahan pada pagu anggaran bukan hanya mencerminkan upaya efisiensi, tetapi juga respons terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang di daerah.



**Tabel 5.**  
Review Terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Bitar			17.204.753.371	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Bitar			18.568.007.995	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.230.630.316	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.540.007.995	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100 %	238.616.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100 %	7.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.630.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi	3 Laporan	214.986.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	6.000.000	



		Kinerja Perangkat Daerah					Daerah			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persestase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	100%	8.002.153.916	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	100 %	8.469.005.255	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	8.704.225.71	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	8.446.252.655	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	95.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	21.300.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	928.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	540.000	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	500.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan	18 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	912.600	



Triwulan/ Semesteran SKPD		Solusi/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	125.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	700.800	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	125.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	700.800	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	95%	435.960.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	95 %	129.587.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	19.360.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	475.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan	10 Paket	93.600.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	10 Paket	15.991.600	



		dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				Perengkapan Kantor yang Disediakan			
	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	145.000.000	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-
	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14000 Paket	73.000.000	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	23.830.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475 Laporan	105.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475 Laporan	89.290.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	95%	378.474.868	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	95 %	23.513.600	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	67.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	1.899.600	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4 Unit	95.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	21.614.000	



	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	216.474.868					
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	90%	1.476.500.632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	90%	1.226.056.440
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.975.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.798.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.904.040
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	45 Laporan	1.152.525.132	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	1.048.353.600



			Polayanan Umum Kantor yang Disediakan				Kantor yang Disediakan			
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90%	771.924.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90 %	91.645.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	94.924.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	484.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	89.715.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.420.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		Jumlah Gedung	8 Unit	170.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		Jumlah Gedung Kantor dan	8 Unit	510.000



Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
<b>2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2300 Ton	1.017.964.151	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.796 Ton		195.000.000
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	30 Nelayan/Kelompok nelayan	192.720.960	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	30 Nelayan/kelompok nelayan		30.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	09.870.960	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen		5.000.000
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	25 Unit	102.850.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	25 Unit		25.000.000
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	200 Nelayan	725.971.691	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	200 Nelayan		82.499.837
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang	145 Orang	408.758.165	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Masingkat	160 Orang		135.000.000



		Meningkatkan Kapasitasnya					Kapasitasnya			
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	80 Kelompok	116.490.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	80 Kelompok	15.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40 Unit Usaha	120.723.526	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40 Unit Usaha	5.000.000	
2.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2070 Ton	64.000.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Produk Perikanan di TPI	2070 Ton	5.000.000	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	64.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	5.000.000	
2.4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Rawan, dan Genangan Air	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	34 unit kapal	35.271.500	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air		Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	34 Unit Kapal	3.000.000	



	Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimainkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Lainnya yang Dapat Dimainkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	34 Rekomendasi	35.271.500	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	34 Rekomendasi	5.000.000	
3.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi/Hias ; Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi		3.506.158,90	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi/Hias ; Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	204.890,88 ekor ; 17.300 Ton	375.000,00	
3.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	140 Pembudidaya	2.355.642,40	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	140 Pembudidaya	253.000,000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	90 Kelompok	2.107.060,90	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	240.000,000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan	3 Kelompok	21.961.500	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	10.000,000	



		Pengembang an Kelembagaan								
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	6 Kelompok	26.620.000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	3.000.000	
3.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudida yaan Ikan yang dilaksanakan	6 Jenis	1.430.516.42 0	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	6 Jenis	122.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	15.972.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	208.301.500	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	10.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya an Ikan	2 Unit	204.532.185	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	2 Unit	50.000.000	



			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				Kabupaten/ Kota			
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	175 Dokumen	523.475.645	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	75 Dokumen	35.000.000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 unit	470.235.090	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 unit	20.000.000
4.	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		Prosentase Peningkatan Produksi PUD	5%	270.000.000	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		Prosentase Peningkatan Produksi PUD	5%	10.000.000
4.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan Dalam Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	30 orang/kelompok	270.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan Dalam Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	27 orang/kelompok	10.000.000
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan		Jumlah pelaku usaha pembudidayaan	10 pelaku usaha	135.000.000	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha pembudidayaan	12 pelaku usaha	5.000.000



	kabupaten/kota		aan ikan yang diperiksa keputusannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				ikan yang diperiksa keputusannya sesuai kewenangan kabupaten/kota			
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	15 Pelaku usaha 135.000.000	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	15 Pelaku usaha	1.000.000	
5.	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Prosentase Pengolahan produk perikanan	24% 180.000.000	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Prosentase Pengolahan produk perikanan	15%	40.000.000	
5.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	1 Dokumen tanda daftar 28.750.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	1 Dokumen Tanda Daftar	5.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan	1 Dokumen 28.750.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala	1 Dokumen	5.000.000	



			Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				Usaha dan Risiko			
5.1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	26 Pelaku usaha	66.350.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	26 Pelaku usaha	12.000,00	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	26 Unit Usaha	66.350.000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	26 Unit Usaha	12.000,00	
5.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Produk Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	27,016 Ton	84.700.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	27,016 Ton	23.000.000	



			yang disejajarkan							
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	27,016 Ton	80.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	27,016 Ton	20.000.000
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku usaha	4.700.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	3.000.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				11.378.442,6 40	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				4.024.233.600
6.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Terbaik	0,3%	4.500.000,00 0	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Terbaik	0,3 %	449.499.900
6.1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keanekaragaman Kabupaten/ Kota		Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG	2 Jenis Fasilitas	3.468.725,00 0	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keanekaragaman Kabupaten/ Kota		Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG	2 Jenis Fasilitas	384.499.900
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/	1 Dokumen	3.109.347,50 0	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	364.500.300



	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman		Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen 359.377.500,	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	19.999.600	
6.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	22800 sampel Bibit/ Pakan	445.885.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	1500 sampel Bibit/ Pakan	150.000.000	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hewan Pakan Ternak		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar	11.000 Laporan	445.885.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar	1100 Laporan	150.000.000	
6.3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awas	69 unit usaha	27.500.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awas	30 Unit Usaha	5.000.000	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12 Laporan	27.500.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12 Laporan	5.000.000	
6.4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	20 unit usaha pakan ternak	337.890.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	20 unit usaha pakan ternak	330.000.000	
	Pengawasan Produk		Jumlah	50 Laporan	337.890.000	Pengawasan Produk	Jumlah	50 Laporan	330.000.000	



	Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			
7.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		Proses/ stage Prasarana Peternakan Layak Fungsi	75%	1.610.000,00	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Presentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	80%	222.833,760	
7.1	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	5 Unit	1.610.000,00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	5 Unit	222.833,760	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	173.250.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	2.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	918.312.500	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	5 Unit	217.833,760	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	518.437.500	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	3.000.000	
8.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN</b>		Persentase penyakit hewan menular	97% ; 12 Sertifikat	2.549.112,97	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN</b>	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani	92% ; 35 Sertifikat	2.591.900.000	



MASYARAKAT VETERINER		yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap; jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi			MASYARAKAT VETERINER	sesuai dengan waktu tanggap; jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi			
B.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Kesehatan Hewan yang dijamin	65%	535.310.544	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	65 %	20.000.000	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	100 Laporan	400.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	100 Laporan	10.000.000	
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	20 Wilayah	20.000.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	20 Wilayah	5.000.000	
	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	30 Kasus	35.310.544	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	30 Kasus	5.000.000	
B.2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Dokumen Pemasukan dan	450 Dokumen	146.410.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Terak yang di	200 Dokumen	10.000.000	



Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan yang di terbitkan			terbitian				
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	550 Laporan	146.410.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran HPM	550 laporan	146.410.000	
8.3 Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan jasa Laboratori um dan jasa Medik Veteriner yang dikelola	4400 pelayanan	1.050.037.42 6	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner yang dikelola	650 Pelayanan	2.468.900.000	
Penyediaan Pelayanan jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan jasa Laboratori um	3500 Laporan	565.738.367	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan jasa Laboratorium	150 Laporan	85.000.000	
Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan jasa Medik Veteriner	500 Laporan	484.299.059	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan jasa Medik Veteriner	500 Laporan	2.383.900.000	
8.4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	380 Unit usaha	351.505.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	120 Unit Usaha	15.000.000	
Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha	Jumlah unit usaha produkt	80 Unit usaha	199.650.000	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah	80 Unit- Usaha	5.000.000	



	produk hewan		hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi				dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi			
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	250 Laporan	78.650.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	250 Laporan	5.000.000	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	50 Dokumen	71.205.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	50 Dokumen	5.000.000	
8.5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	465.850.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	4.000 Lokasi	80.000.000	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	16.700 Laporan	465.850.000	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	16800 Unit	80.000.000	
9.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	171.060.752	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	8.000.000	
9.1	Pengendalian dan		Jumlah	3 Bencana	571.060.752	Pengendalian dan	Jumlah Bencana	3 Bencana	8.000.000	



	Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan			Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Peternakan yang ditangani dan dikendalikan		
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3 laporan	571.060,752	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3 laporan	8.000,000
10.	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		Presentase Peningkatan Jumlah Pangajuan perizinan	20%	525.653,910	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		Presentase Peningkatan Jumlah Pangajuan perizinan	5%	5.000,000
10.1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	2 izin usaha	500.713,910	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		izin usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	2 izin Usaha	5.000,000
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan		Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan	2 Laporan	500.713,910	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/ Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner,		Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori,	2 Laporan	5.000,000



			yang diawasi			atau Pasar Hewan		Praktik Dokter Hewan Mandiri/ Pukerwas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedic veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi			
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Fasilitas Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan	1 izin usaha	16.940.000	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Fasilitas Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan			
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	2 Laporan	16.940.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi			
11.	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Persentase peningkatan peternak terampil	0%	1.622.615,00	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Persentase peningkatan peternak terampil	0%	325.000,000	
11.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	100 orang	1.622.615,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	100 orang	325.000,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	20 Unit	1.622.615,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	325.000,000	



Rencana Kerja (Roket) Tahun 2025

		Ditingkatkan Kapasitasnya								
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dan kegiatan masyarakat melalui 2 jalur, yaitu melalui usulan musrenbang dan melalui usulan pokok pikiran wakil rakyat. Usulan kegiatan musrenbang dilakukan dari bawah dimulai dari musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan dan kabupaten. Proses usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing OPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh semua OPD teknis. Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan didapatkan beberapa usulan dibidang peternakan dan perikanan. Usulan tersebut dilakukan pencocokan dan verifikasi awal data usulan oleh Tim Dinas Peternakan dan Perikanan dengan tim musrenbang dari kecamatan. Usulan yang dianggap layak, dilakukan prioritas usulan yang di sampaikan pada musrenbang tingkat kabupaten.

Usulan melalui pokok pikiran DPRD disampaikan melalui aplikasi e-pokir SIPD, usulan diteruskan ke BAPPEDA selanjutnya disampaikan ke OPD teknis untuk diverifikasi. Beberapa usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang serta usulan dari pokok pikiran DPRD sebagaimana terlampir berikut

**Tabel 6.**  
Usulan Program, dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOL	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah Ternak Poktan Lohjinawi, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	30 ekor	Pokok Pikiran
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah Ternak Poktan Lestari, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kab. Blitar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	30 ekor	Pokok Pikiran



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Hibah Ternak Poktan Margo Selo, Desa Pulerejo, Kecamatan Bakung, Kab. Blitar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	30 ekor	Pokok Pikiran
4	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi Desa Tingal, Kab. Blitar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 orang	Musrenbang
5	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan Ternak, Desa Tingal, Kab. Blitar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50 orang	Musrenbang
6	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Magot Pandanarum, Sutojayan, Blitar, Kab. Blitar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 orang	Musrenbang
7	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi Kantor Kelurahan Sutojayan, Jl. Cakraningrat No. 38, Kab. Blitar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 orang	Musrenbang
8	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Budidaya Ternak Desa Sumberjo, Kab. Blitar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 orang	Musrenbang
9	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Budidaya Magot dsn Krajan RT 03 RW 01, Maron Kab. Blitar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 orang	Musrenbang
10	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan Ternak Jl. Trisula No. 32, Kab. Blitar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	10 orang	Musrenbang



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

11	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Hias Dusun Kalipucung RT.002 RW.005, Kab. Blitar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 orang	Musrenbang
12	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan Ternak Desa Sumberarum, Kab. Blitar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50 orang	Musrenbang
13	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan Ternak Kelurahan satreyan, Kab. Blitar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50 orang	Musrenbang
14	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan Ternak Kantor Desa Popoh, Kab. Blita	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50 orang	Musrenbang
15	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Budidaya Ternak Dusun Sopyono Pohgajih RT 3 RW 1, Kab. Blitar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	Musrenbang
16	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan Ternak Kel. Dandong RT. 03 Rw. 05, Kab. Blitar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	30 orang	Musrenbang
17	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan Ternak Lingkungan Kauman RT 003 RW 002, Kab. Blitar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	30 orang	Musrenbang



### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai adalah:

SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja:

1. Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.

SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja:

1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional;
2. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan.

SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja:

1. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
2. Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan.

SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja:

1. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan;
2. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian.

SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja:

1. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan;
2. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan.



- SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja:
1. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani;
  2. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis;
  3. Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK).
- SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja:
1. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya;
  2. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian.
- SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
1. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
- SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja:
1. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka mendukung pelaksanaan sasaran strategis dan sasaran prioritas Renstra Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi daging, telur dan susu di wilayah Kabupaten Blitar. Tahun 2021-2023 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat merealisasikan sesuai target, namun pada ketersediaan swasembada jagung dan kedelai di wilayah Kabupaten Blitar belum mampu memenuhinya. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya kelangkaan jagung di wilayah Kabupaten Blitar. Padahal jagung merupakan unsur utama pada bahan pakan ternak.



Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar juga mengacu pada Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sehingga dukungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Penyediaan sumber protein hewani di Kabupaten Blitar dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas bibit ternak serta meningkatnya populasi, produksi dan produktifitas ternak;
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit ternak strategis;
3. Peningkatan pengawasan program Pangan Asal Hewan (PAH) menuju ASUH.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD provinsi yaitu mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah (dalam dan luar negeri).

Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah pertumbuhan ekonomi dan *theil index*. Dinas kelautan dan perikanan mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan dengan indikator sasaran Persentase pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah **"Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan"**. Adapun sasaran dari tujuan pertama meliputi:

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan;



2. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi (St) dan arah kebijakan (Kj) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dari sasaran (Ss) yang ada diimplementasikan sebagai berikut:

Ss1. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan.

St1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Kj1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur.

St2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Kj1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur;

Kj2. Meningkatkan pendapatan.

St3. Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar.

Kj1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur;

Kj2. Meningkatkan pendapatan.

St4. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut sesuai zonasi dengan teknologi tepat guna.

Kj1. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut melalui kemitraan strategis.

St5. Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan pengembangan produk hasil perikanan.

Kj1. Meningkatkan produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu.

St6. Meningkatkan produksi benih ikan air payau dan laut.

Kj1. Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan Jawa Timur.

St7. Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kj1. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakses pelayanan Kesehatan ikan dan lingkungan.

St8. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

Kj1. Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang Kelautan dan perikanan di Jawa Timur.

St9. Meningkatkan luasan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan.

Kj1. Mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan.



St10. Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan.

Kj1. Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan di Jawa Timur.

Ss2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

St11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN.

Kj1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dengan strategi dan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak yang menjadi harapan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) pada sektor perikanan dan kelautan. Dampak yang lain adalah perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk masa tahun 2025 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran
T.1	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	S.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	S.1.1	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah
		S.2	Meningkatnya produksi hasil perikanan	S.2.1	Prosentase peningkatan produksi perikanan
		S.3	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	S.3.1	Prosentase peningkatan produktifitas ternak
				S.3.2	Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
				S.3.3	Prosentase produk peternakan yang layak edar



### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan, terdapat sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan program-program tersebut selaras dengan tujuan strategis daerah, nasional. Perumusan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan operasional, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek strategis seperti visi dan misi kepala daerah, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengentasan kemiskinan, dan pengarusutamaan gender. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Blitar.

**Tabel 7.**

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	
3.25.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
3.25.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
3.25.01.2.02.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
3.25.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	



		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
3.25.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
3.25.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</b>	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3.25.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</b>	
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
3.25.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</b>	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
3.25.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	Mendukung pencapaian SDGs



3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	
3.25.03.2.01.00 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	
3.25.03.2.01.00 04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	
3.25.03.2.02.00 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Mendukung pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender.
3.25.03.2.02.00 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
3.25.03.2.02.00 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	
3.25.03.2.03.0 002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	
3.25.03.2.04.00 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Keci	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	
3.25.04.2.02.00 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
3.25.04.2.02.00 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	
3.25.04.2.02.00	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan	Jumlah Kelompok Usaha	



03	Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Pembiayaan, Usahanya	Bantuan Bantuan Kemitraan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	
3.25.04.2.04.00 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.25.04.2.04.00 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.25.04.2.04.00 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	
3.25.04.2.04.00 09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.25.04.2.04.00 10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Prosentase Peningkatan produksi PUD</b>	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	
3.25.05.2.01.00 04	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	
3.25.05.2.01.00 07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Prosentase Pengolahan produk perikanan</b>	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	
3.25.06.2.01.00 05	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	



3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	
3.25.06.2.02.00 02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	
3.25.06.2.03.00 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung penurunan stunting
3.25.06.2.03.00 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak</b>	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	
3.27.02.2.02.00 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
3.27.02.2.02.00 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	
3.27.02.2.03.00 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awasi	
3.27.02.2.04.00 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	
3.27.02.2.05.00 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	



3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	
3.27.03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/dipelihara	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	
3.27.04.2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	
3.27.04.2.01.0003	<b>Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular</b>	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	
3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
3.27.04.2.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	
3.27.04.2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
3.27.04.2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	



3.27.04.2.04.00 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
3.27.04.2.04.00 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.27.04.2.04.00 05	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	
3.27.04.2.05	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan</b>	
3.27.04.2.05.00 03	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	
3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Peternakan</b>	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	
3.27.05.2.01.00 04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
3.27.06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Perijinan</b>	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
3.27.06.2.02.00 06	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	
3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Prosentase peningkatan peternak terampil</b>	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	
3.27.07.2.01.00 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	



## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Peternakan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergerak di bidang peternakan dan perikanan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan meliputi:

1. Potensi perikanan budidaya: Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam sektor perikanan budidaya, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Besarnya peluang pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadikan peningkatan produksi perikanan budidaya sebagai fokus utama.
2. Potensi perikanan tangkap: Wilayah laut dan perairan umum daratan di Kabupaten Blitar menyediakan potensi perikanan tangkap yang signifikan. Optimalisasi sumber daya perikanan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan setempat.
3. Dominasi sektor peternakan: Sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar menggantungkan perekonomiannya pada subsektor peternakan, baik ternak unggas, besar, maupun kecil. Untuk mendukung hal ini, diperlukan pembinaan berkelanjutan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk peternakan. Hal ini juga mencakup pengawasan usaha, pengendalian penyakit, fasilitasi pemasaran, dan peningkatan nilai tambah produk.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana: Diperlukan dukungan yang kuat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana administrasi, baik bagi aparatur maupun pelaku usaha, guna memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Demi mencapai tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025, Dinas Peternakan dan Perikanan akan melaksanakan serangkaian program prioritas yang meliputi 11 program utama, 30 kegiatan, dan 61 subkegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar dalam dua urusan pemerintahan, yakni urusan kelautan dan perikanan serta urusan pertanian (subsektor peternakan), yang semuanya dirancang untuk mendukung visi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URAIAN / KEGIATAN KELAS / PROGRAM / SUBKELAS / SUB KEMUKA	INDIKATOR PENCAPAIAN KUALITAS / Kuantitas	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI (% DARI MULAI JENJIR TAHUN 2025)	PERSYARATAN CAPAIAN TARGET TERMAK SIKUR TAHUN 2024	LOKASI/LOKASI DAN KEMUNGKINAN					WILAYAH SARAJAH	PENCAPAIAN KUALITAS TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERENCANAAN JURUSAN		
							TUNGGAL JENJIR	PANGKALAN (No)	LOKASI	KEMUNGKINAN	PENCAPAIAN		TARGET	PENCAPAIAN (%)			
											ALTERNATIF					LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>MANAJEMEN DAN PEMERINTAH</b>															
		<b>MANAJEMEN DAERAH</b>															
		<b>MANAJEMEN PERANGKAT DAERAH (MADR) DAN PERENCANAAN</b>															
1.	1.01.01	PROGRAM PERENCANAAN KUALITAS PERENCANAAN KEMUNGKINAN	Indikator tingkat capaian kualitas perencanaaan program, kebijakan, rencana operasional daerah	100 %		100 %	100 %	1.000.000.000						100 %	10.000.000.000		
	1.01.01.01	Perencanaan Pengembangan dan Strategi Rencana Perencanaan Daerah	Perencanaan kebijakan Pengembangan, dan Strategi Rencana Perencanaan Daerah yang terintegrasi dan sesuai dengan program	100 %		100 %	100 %	1.000.000.000						100 %	10.000.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	1.01.01.01.001	Perencanaan Struktur Perencanaan Perangkat Daerah							1 Tahun	1.000.000.000	Kab. Blitar Kantor Perencanaan Kabupaten/Blitar	DINAS TRANSKORPORASI JALAN DARAT ALOKASI DAERAH				100 %	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	1.01.01.01.007	Perencanaan Strategi Perangkat Daerah							1 Tahun	1.000.000.000	Kab. Blitar Kantor Perencanaan Kabupaten/Blitar	DINAS TRANSKORPORASI JALAN DARAT ALOKASI DAERAH				100 %	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	1.01.01.010	Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah	Perencanaan Laporan Kerangka Acuan Perencanaan perencanaan daerah yang sesuai dengan dan akurat	100 %		100 %	100 %	1.000.000.000.000						100 %	10.000.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	1.01.01.010.001	Perencanaan Anggaran Tahunan RPD							12 Orang/bulan	1.000.000.000.000	Kab. Blitar Kantor Perencanaan Kabupaten/Blitar	DINAS TRANSKORPORASI JALAN DARAT ALOKASI DAERAH				100 %	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	1.01.01.010.002	Perencanaan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perencanaan RPD							12 Orang/bulan	1.000.000.000	Kab. Blitar Kantor Perencanaan Kabupaten/Blitar	DINAS TRANSKORPORASI JALAN DARAT ALOKASI DAERAH				100 %	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	1.01.01.010.004	Revisi dan Pelaksanaan Rencana RPD							12 Orang/bulan	1.000.000.000	Kab. Blitar Kantor Perencanaan Kabupaten/Blitar	DINAS TRANSKORPORASI JALAN DARAT ALOKASI DAERAH				100 %	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN





No	Kode	Uraian (Bidang, Lokasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Awal Periode Rencana Kerja	Realisasi Uraian Kerja/OPD Tahun 2024	Pencapaian Capaian Sasaran/Target Rencana Kerja	SILABUS KUALITAS DAN KEMAMPUAN PEKERJAAN						Kategori Sasaran	PENCAPAIAN SAJAT HINDAKIA TAHUN 2024		Pencapaian Sasaran/ Peningkatan Kinerja
							Target 2024	Pencapaian 2024 (%)	Lokasi	Sumber Dana	Peningkatan			Target	Pencapaian 2024 (%)	
											Manajemen	Keahlian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kerja yang Disiapkan				1.000	1.000.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		10.000.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.04.01.2.01.001 Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi																
			Jumlah Unit Pemeliharaan dan Rehabilitasi yang Disiapkan				4.000	21.000.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		60.000.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	1.04.01.2.01	Peningkatan dan Pemeliharaan Unit Pemeliharaan (Unit)	Peningkatan dan Pemeliharaan Unit Pemeliharaan (Unit) yang disiapkan saat ini	80%			80%	1.200.000.000,00			-	-	-	80%	1.200.000.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.04.01.2.01.002 Peningkatan dan Rehabilitasi																
			Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Rehabilitasi				10.000.000	1.000.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		10.000.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.04.01.2.01.003 Peningkatan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat)																
			Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan				10.000.000	10.000.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		10.000.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.04.01.2.01.004 Peningkatan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat)																
			Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan				10.000.000	1.000.000.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		1.000.000.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	1.04.01.2.01	Peningkatan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini	Peningkatan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini	80%			80%	91.000.000,00			-	-	-	80%	91.000.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.04.01.2.01.005 Peningkatan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini																
			Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini				10.000	88.700.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		88.700.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.04.01.2.01.006 Peningkatan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini																
			Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini				4.000	1.400.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		1.400.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1.04.01.2.01.008 Peningkatan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini																
			Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Rehabilitasi (Unit dan Alat) yang disiapkan saat ini				4.000	100.000,00	Kab. Blitar, Seluruh Kabupaten, Semua Kad/Desa	DANA DAERAH, DANA DAERAH, DANA DAERAH	-	-	-		100.000,00	100% PETERNAKAN DAN PERIKANAN













No	Kode	NAMA PROGRAM KELUARA / PROGRAM- KORIDOR 1000 KORIDOR 1000	REVISI/REVISI KORIDOR 1000 REVISI	TARICHT KORIDOR REVISI REVISI	REALISASI CORUM REVISI REVISI	REVISI TARICHT KORIDOR REVISI	LAPORAN KEBERLAHAN DAN KEMERDEKAAN PERUSAHAAN						REVISI KORIDOR	REVISI KORIDOR		REVISI KORIDOR	
							TARGET KORIDOR	REALISASI KORIDOR	LAMA	KORIDOR	REVISI			REVISI	REVISI		
											REVISI	REVISI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.01.01.01.0000		Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitas Peternakan					1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.01.01.01.0001		Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitas Peternakan (Kandang)					1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.01.01.01.0002		Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitas Peternakan (Kandang)					1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.01.01.01.0003		Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitas Peternakan (Kandang)					1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.01.01.01.0004		Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitas Peternakan (Kandang)					1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.01.01.01.0005		Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitas Peternakan (Kandang)					1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.01.01.01.0006		Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitas Peternakan (Kandang)					1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
							1.000	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00







## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025, berikut adalah beberapa hal penting yang perlu disampaikan:

1. Penyusunan RENJA OPD disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini menjadi pedoman capaian kinerja tahunan dengan mengacu pada kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Blitar dan Pimpinan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran tahun 2025.
2. Pencapaian visi dan misi berdasarkan RPJMD dan Renstra 2021-2026 menjadi landasan dalam merumuskan program, kegiatan tahunan, serta kebijakan dan strategi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan mengatasi kendala yang ada dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Fokus utama program tahun 2025 diarahkan pada pemberdayaan masyarakat peternak dan petani ikan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan produk unggulan ternak dan perikanan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, serta menyokong industri melalui revitalisasi sektor peternakan, perikanan, dan pelestarian sumber daya alam.

Dengan demikian, Rencana Kerja 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar di sektor peternakan dan perikanan.

Blitar, 08 Agustus 2024  
KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR



**EKO SUSANTO, ST., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196907011997031003